

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
BAB I PENDAHULUAN	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN LALU	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika	16
2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika.....	18
2.4 Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	19
2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD	20
BAB III TUJUAN, SASARAN, DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	32
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	32
3.1.1 Kementerian Komunikasi dan Informatika.....	32
3.1.2 Badan Sandi dan Siber Negara	33
3.1.3 Badan Pusat Statistik.....	35
3.1.4 Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat	36
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika	38
3.3 Program dan Kegiatan	42
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	55
BAB V PENUTUP	72

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan nasional.

Selanjutnya berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada Pasal 138, disebutkan bahwa perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sesuai dengan amanat tersebut, maka setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (Satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika disusun sebagai dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang mengacu pada RKPD Kota Padang Panjang Tahun 2024 dan berpedoman kepada Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika didasari kepada :

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 I-4 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- e. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 96);
- f. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 172);
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- h. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorale oleh Pemerintah Daerah.
 - i. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika
 - j. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
 - k. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
 - l. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2019 Nomor 7);
 - m. Peraturan Walikota Padang Panjang 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang.
 - n. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 6):
 - o. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 12):
 - p. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor ... Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya alam dalam rangka pembangunan daerah. Disamping itu Renja juga digunakan sebagai tolak ukur kinerja aparat Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam kurun waktu tahun Anggaran 2024.

Adapun tujuan disusunnya Renja Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2024 ini antara lain untuk :

1. Sebagai pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
3. Sebagai acuan dalam penyusunan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika
- 2.4 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- 2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III : TUJUAN, SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

BAB IV : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang menyelenggarakan 3 (tiga) urusan wajib non pelayanan dasar terkait urusan Komunikasi dan Informatika, urusan Statistik dan urusan Persandian. Untuk melaksanakan masing masing urusan itu dialokasikan belanja melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA setelah perubahan) sebesar Rp. 9.395.158.526,- dalam bentuk pelaksanaan 5 (lima) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan selama tahun 2022. Adapun program dan kegiatan pada urusan Komunikasi dan Informatika yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika selama tahun 2022 secara fisik terealisasi sebesar 100 % dengan realisasi keuangan sebesar Rp.9.175.597.733,- atau mencapai 97,66%. Lebih lanjut, terkait dengan evaluasi pencapaian Renja Tahun 2022, Dapat dijabarkan sebagai berikut :

TABEL 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RESTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2023 KOTA PADANG PANJANG

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah Tahun 2023)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan Tahun 2021	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target Program Dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2023)	
					Target Renja Perangkat Daerah (2022)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program Dan Kegiatan S/D Tahun Berjalan 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8= 7/6	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
X-XX-01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100 %	100	100	100	100%	100	100	100%
X-XX-01-2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Capaian kinerja yang di susun	64 laporan	22	21	21	100%	21	64	100%
X-XX-01-2.01-06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian kinerja yang di susun	64 laporan	22	21	21	100%	21	64	100%
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	1	1	1	100%	1	3	100%

1	2	3	4	5	6	7	8= 7/6	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
X-XX-01-2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase layanan keuangan perangkat daerah	100 %	100	100	100	100%	100	100	100%
X-XX-01-2.02-01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran gaji dan tambahan penghasilan	42 bulan	14	14	14	100%	14	42	100%
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang	25	25	25	100%	25	25	100%
X-XX-01-2.02-05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Akhir Tahun yang di susun	3 laporan	1	1	1	100%	1	3	100%
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 laporan	1	1	1	100%	1	3	100%
X-XX-01-2.02-07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Bulanan dan semesteran yang di susun	54 laporan	18	18	18	100%	18	54	100%
		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	54 laporan	18	18	18	100%	18	54	100%
X-XX-01-2.02-08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Laporan Prognosis yang di susun	3 laporan	1	1	1	100%	1	3	100%
		Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	3 laporan	1	1	1	100%	1	3	100%
X-XX-01-2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi perkantoran	100 %	100	100	100	100%	100	100	100%
X-XX-01-2.06-01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen listrik yang diadakan	4 jenis	4	4	4	100%	4	4	100%
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	4	4	4	100%	4	4	100%

1	2	3	4	5	6	7	8= 7/6	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
X-XX-01-2.06-04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Alat tulis Kantor yang disediakan	7 jenis	7	7	7	100%	7	7	100%
		Jumlah jenis bahan pendukung penyediaan surat menyurat	2 jenis	2	2	2	100%	2	2	100%
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 jenis	0	9	9	100%	9	9	100%
X-XX-01-2.06-05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah jenis penyediaan barang cetakan dan penggandaan	3 Jenis	3	3	3	100%	3	3	100%
		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Jenis	0	3	3	100%	3	3	100%
X-XX-01-2.06-09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah keikutsertaan dalam rapat koordinasi dalam dan luar daerah	380 ok	130	125	125	100%	125	380	100%
		Jumlah makan minum rapat yang disediakan	6,000 ok	2000	2,000	2,000	100%	2,000	6,000	100%
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 laporan	1	1	1	100%	1	3	100%
X-XX-01-2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah	100 %	100	100	100	100%	100	100	100%
X-XX-01-2.08-02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah tagihan rekening yang di bayarkan	3 Rekening	3	3	3	100%	3	3	100%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 laporan	1	1	1	100%	1	3	100%

1	2	3	4	5	6	7	8= 7/6	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
X-XX-01-2.08-04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa layanan umum kantor yang disediakan	3 Jenis	3	3	3	100%	3	3	100%
		Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	8 orang	8	8	8	100%	8	8	100%
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 laporan	1	1	1	100%	1	3	100%
X-XX-01-2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase capaian pemeliharaan barang milik daerah	100 %	100	100	100	100%	100	100	100%
X-XX-01-2.09-01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	7	7	7	100%	7	7	100%
X-XX-01-2.09-02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	7	7	7	100%	7	7	100%
X-XX-01-2.09-09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Gedung	1	1	1	100%	1	1	100%
X-XX-01-2.09-10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Jenis	7	7	7	100%	7	7	100%
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	50 %	37.6	45	42	93%	50	50	100%
2-16-02-2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rata-rata kunjungan pada laman resmi kominfo Padang Panjang	85,000 %	40,000	80,000	243,846	305%	80,000	85,000	100%

1	2	3	4	5	6	7	8= 7/6	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
2-16-02-2.01-04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah konten videotron	2400 Konten	1455	750	990	132%	800	2,400	100%
		Jumlah OPD yang sudah mengelola daftar informasi publik	24 OPD	18	22	23	105%	24	24	100%
		Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	5 oang	5	5	5	100%	5	5	100%
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	3 laporan	1	1	1	100%	1	3	100%
2-16-02-2.01-05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah jenis media informasi pembangunan daerah	5 Jenis	5	5	5	100%	5	5	100%
		Jumlah release berita mengenai informasi aktual di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang melalui media sosial	2,700 rilis	1236	900	1491	166%	1000	3,727	138%
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	3 laporan	1	1	1	100%	1	3	100%
2-16-02-2.01-07	Layanan Hubungan Media	Jumlah jenis media informasi pembangunan daerah	5 Jenis	5	5	5	100%	5	15	300%
		Jumlah pertemuan jumpa pers	16 kali	0	8	8	100%	8	16	100%
		Jumlah Layanan Hubungan Media	3 laporan	0	1	1	100%	1	2	67%
2-16-02-2.01-12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah KIM yang aktif	6 Kelompok	0	2	2	100%	2	4	67%
		Jumlah konten positif	40 konten	0	20	20	100%	20	40	100%
		Jumlah media tradisional yang dibina	3 Kelompok	2	1	1	100%	1	4	133%
		Jumlah pelatihan bakohumas yang diadakan	2 kali	0	1	1	100%	1	2	100%

1	2	3	4	5	6	7	8= 7/6	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	3 laporan	1	1	1	100%	1	3	100%
2/16/2003	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks Implementasi tata kelola SPBE	2.15		2.1	2.1	100%	2.1	2.12	99%
		Indeks Implementasi Layanan SPBE	3.55		3.55	3.55	100%	3.55	3.55	100%
2-16-03-2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah layanan berbasis elektronik yang terintegrasi	20 Layanan	0	16	16	100%	18	18	90%
2-16-03-2.02-07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	jumlah layanan berbasis elektronik yang terintegrasi	20 Layanan	0	16	16	100%	18	20	100%
		Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	7 orang	0	7	7	100%	7	14	67%
		Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	20 Layanan	0	16	16	100%	18	20	100%
2-16-03-2.02-10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	jumlah jenis infrastruktur teknologi informasi yang terkelola	7 Jenis	0	7	7	100%	7	7	100%
		Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	14 orang	0	14	14	100%	14	14	100%
		Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	3 laporan	1	1	1	100%	1	3	100%

1	2	3	4	5	6	7	8= 7/6	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)
2/20/2002	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun pelaporan pembangunan daerah	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
2-20-02-2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan	8 Dokumen	0	2	2	100%	3	8	100%
2-20-02-2.01-01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan	8 Dokumen	0	2	2	100%	3	8	100%
		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	3 laporan	0	1	1	100%	1	3	100%
2-20-02-2.01-02	Peningkatan kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	jumlah pelatihan statistik sektoral yang diadakan	2 kegiatan	0	0	0	0%	1	2	100%
		Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	48 orang	0	0	0	0%	24	48	100%
2/21/2002	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Sistem Elektronik/Layanan SPBE yang Telah Menerapkan tanda tangan Digital	100%	67%	89%	100%	100%	100%	100%	100%
2-21-02-2.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pelatihan	3 ok	1	1	1	100%	1	3	100%
1	2	3	4	5	6	7	8= 7/6	9	10= (5+7+9)	11= (10/4)

2-21-02-2.01-02	Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta pelatihan	24	ok	0	24	24	100%		24	100%
		Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3	laporan	1	1	1	100%	1	3	100%
2-21-02-2.01-03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota berbasis elektronik dan Non Elektronik	Jumlah pelatihan	2	kegiatan		0	0	0%	1	1	100%
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2	laporan		0	0	0%	1	1	100%

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa dari 5 (lima) program, 9 (sembilan) kegiatan dan 24 (dua puluh empat) sub kegiatan selama tahun 2022 hanya 1 (satu) program yang realisasinya sedikit dibawah target yakni Program Informasi dan Komunikasi Publik dengan capaian 93%. Hal ini dikarenakan ada sedikit penyesuaian pada perhitungan indikator Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang, dimana penyusunan program dan kegiatan diarahkan dalam rangka melaksanakan 3 (tiga) urusan wajib pemerintahan yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang yakni urusan bidang Komunikasi dan Informatika, urusan Persandian dan urusan Statistik.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang tahun 2022 sesuai dengan RPJMD dan Perubahan Renstra Dinas Kominfo 2018-2023 adalah cukup baik dimana ada beberapa capaian yang sudah melebihi target. Lebih lanjut terkait dengan pemenuhan Indikator Kinerja Utama dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah pada Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi capaian tahun ke-		Proyeksi		Catatan Analisis
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	(n) 2024	(thn n+1) 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)	(13)	(14)
1.	Indeks Sistim Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)			2,25	2,6			2,81	2,9	3	3,1	
2	Persentase Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik			93%	94%			99,92%	100%	100%	100%	
3.	Persentase data statistik sektoral yang terpublikasi			83%	100%			100%	100%	100%	100%	
4.	Nilai IKM Kominfo			86	87			80,98	87	88	89	

Dari 4 (empat) indikator yang merupakan sasaran strategis pada Dinas Komunikasi dan Informatika, 3 (tiga) diantaranya sudah teralisasi sesuai dengan target, hanya 1 (satu) indikator yang masih belum terealisasi sesuai dengan target pada tahun 2023 yakni terkait dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan infrastruktur kominfo. Untuk Indikator ini, capaian kinerjanya baru sebesar 93%, hal ini disebabkan oleh kendala teknis yang disebabkan pergantian penyedia layanan internet pada tahun 2022 dimana proses migrasi ini berdampak pada pengelolaan akses internet dan penyediaan wifi ruang publik.

2.3 Isu – isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kominfo Kota Padang Panjang adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Kominfo dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Beberapa isu strategis Dinas Kominfo Kota Padang Panjang dapat diidentifikasi sebagai berikut :

- 1 Optimalisasi penyelenggaraan SPBE, dalam rangka percepatan transformasi digital dan pengembangan ekosistem kota cerdas, dan
- 2 Peningkatan Data Statistik Sektoral yang berkualitas dalam rangka penyelenggaraan satu data dalam penyelenggaraan pemerintahan (kualitas, pengelolaan dan pemanfaatan)

2.4 Penelahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 telah berupaya menyaring dan menelaah usulan-usulan dari masyarakat yang diajukan dalam pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) baik ditingkat Kelurahan maupun ditingkat Kecamatan.

Usulan-usulan yang disampaikan masyarakat sepanjang berkaitan dengan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang dan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku akan diakomodir dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam tahun berjalan maupun pelaksanaan tahun berikutnya.

Tabel 2.3

**Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kota Padang Panjang**

No	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
	NIHIL				

2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Mengacu pada Renstra 2024-2063, dilakukan analisis lebih lanjut terhadap kebutuhan pelaksanaan program dan kegiatan untuk Tahun Anggaran 2024. Berdasarkan rencana kegiatan dan analisis kebutuhan kemudian dimunculkan sejumlah program dan kegiatan beserta penganggarnya. Dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2024 terdapat 5 (lima) program dengan 10 (Sepuluh) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan Pagu Indikatif Rp. 7.286.236.600. Sementara berdasarkan analisis kebutuhannya masih dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 8.947.787.850. Lebih lanjut terkait dengan review terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.3
Review terhadap Rancangan Awal RKPD TA 2023
Kota Padang Panjang

Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Rancangan awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2 16 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100%	3,469,722,436	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi	100%	3,576.807.100	
2 16 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.977.989.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.238.670.000	
2 16 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Padang Panjang	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	25 orang/ bulan	2,977.989.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Padang Panjang	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	25 orang/ bulan	3.238.670.000	Masih terdapat kekurangan anggaran gaji sebesar Rp.258.681.000
2 16 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				203.141.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah				338.137.100	
2 16 01 2.06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Padang Panjang	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang	4 Paket	8,147,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Padang Panjang	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang	4 Paket	8,141.000	

			disediakan					disediakan			
2 16 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Padang Panjang	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	9 Paket	35.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Padang Panjang	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	9 Paket	
2 16 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Padang Panjang	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Paket	10.000.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Padang Panjang	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	3 Paket	10.000.000	
2 16 01 2.06 09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Padang Panjang	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah makan minum rapat yang disediakan	154 Laporan 1300 Ok	150.005.750	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Padang Panjang	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Jumlah makan minum rapat yang disediakan	240 Laporan 2000 Ok	285,000,000	Masih dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 135.000.000
2 16 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				298,878,400	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				298,878,400	
2 16 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Padang Panjang	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik	3 Laporan	110,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Padang Panjang	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi ,sumber daya air dan listrik yang	3 Laporan	110,000,000	

			yang disediakan					disediakan			
2 16 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Padang Panjang	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	3 Laporan 8 Orang	185.600.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Padang Panjang	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	3 Laporan 8 Orang	185.678.400	
2 16 01 2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>				143.608.800	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>				143.608.700	
2 16 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Padang Panjang	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	7 Unit	87.168.800	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Padang Panjang	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	7 Unit	87.168.700	

2 16 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1 Unit	30.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	1 Unit	30.000.000	
2 16 01 2.09 10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Padang Panjang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	7 Unit	26.440.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Padang Panjang	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitasi	7 Unit	26,440.000	
2 16 02	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	43%	1,751,184,600	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	43%	2.505.033.550	
2 16 02 2.01	<i>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>jumlah follower pada laman resmi kominfo padang panjang (instagram)</i>	27.000	1.321.391.300	<i>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>		27.000		2.505.033.550	
2 16 02 2.01 04	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Padang Panjang	Jumlah dokumen hasil pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	1 Dokumen	269.257.150	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Padang Panjang	Jumlah dokumen hasil pengelolaan konten dan perencanaan media komunikasi publik	1 Dokumen	269.304.200	

			Jumlah konten videotron	850 Konten				Jumlah konten videotron	850 Konten		
			Jumlah PPID pelaksana yang sudah dilakukan monev keterbukaan informasi publik	5 OPD				Jumlah PPID pelaksana yang sudah dilakukan monev keterbukaan informasi publik	5 OPD		
			Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	5 Orang				Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	5 Orang		
2 16 02 2.01 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Padang Panjang	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	1 Dokumen	498.886.650	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Padang Panjang	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan pengelolaan media komunikasi publik	1 Dokumen	415.986.650	
			Jumlah release berita mengenai informasi aktual di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang melalui media sosial	1000 Release				Jumlah release berita mengenai informasi aktual di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang melalui media sosial	1000 Release		

2 16 02 2.01 07	Layanan Hubungan Media	Padang Panjang	Jumlah jenis media informasi pembangunan daerah Jumlah layanan hubungan media Jumlah penerbitan majalah serambi mekkah Jumlah pertemuan jumpa pers	5 jenis 5 Layanan 2 Edisi 8 Kali	527.976.250	Layanan Hubungan Media	Padang Panjang	Jumlah jenis media informasi pembangunan daerah Jumlah layanan hubungan media Jumlah penerbitan majalah serambi mekkah Jumlah pertemuan jumpa pers	5 jenis 5 Layanan 2 Edisi 8 Kali	1.525.167.250	Masih dibutuhkan anggaran sebesar Rp. 997.191.000
2 16 02 2.01 12	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Padang Panjang	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendiseminasi informasi program atau kebijakan Jumlah KIM yang aktif Jumlah konten positif	1 Dokumen 2 Kelompok 20 Konten	25.271.250	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Padang Panjang	Jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendiseminasi informasi program atau kebijakan Jumlah KIM yang aktif Jumlah konten positif	1 Dokumen 2 Kelompok 20 Konten	25.271.250	

			Jumlah media tradisional yang dibina	1 Kelompok				Jumlah media tradisional yang dibina	1 Kelompok		
			Jumlah pelatihan bakohumas yang diadakan	1 Kegiatan				Jumlah pelatihan bakohumas yang diadakan	1 Kegiatan		
2 16 03	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		Indeks implementasi tata kelola SPBE	3.55	2.252.556.500	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA		Indeks implementasi tata kelola SPBE	3.55	2,823,967,200	
2 16 03 2.02	<i>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan</i>	<i>4 aplikasi</i>	<i>2.252.556.500</i>	<i>Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan</i>	<i>4 aplikasi</i>	<i>2.823,967,200</i>	
2 16 03 2.02 07	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Padang Panjang	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	4 aplikasi	331,113,600	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Padang Panjang	Jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan	4 aplikasi	331,113,600	

			Jumlah Dok hasil Pengembang an Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintah n Berbasis Elektronik	1 dokumen				Jumlah Dokumen hasil Pelaksanaan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	1 dokumen		
			Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	7 Orang				Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	7 Orang		
2 16 03 2.02 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Padang Panjang	Jumlah dokumen pelaksanaan pengembang an dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah Jumlah jenis infrastruktur teknologi informasi yang terkelola Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	1 Dokumen 7 Jenis 14 Orang	1.908.802.900	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Padang Panjang	Jumlah dokumen pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi pemerintah daerah Jumlah jenis infrastruktur teknologi informasi yang terkelola Jumlah tenaga harian lepas yang dibayarkan	1 Dokumen 7 Jenis 14 Orang	2.108.802.900	

2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARA AN STATISTIK SEKTORAL		Jumlah OPD yang menggunak an data statistik dalam menyusun pelaporan pembangun an daerah	100%	30.000.000	PROGRAM PENYELENGGAR AAN STATISTIK SEKTORAL		Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun pelaporan pembangunan daerah	100%	30.020.000	
			Jumlah OPD yang menggunak an data statistik dalam menyusun perencanaa n pembangun an daerah					Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah			
2 20 02 2.01	<i>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>Jumlah dokumentas i statistik sektoral yang diadakan</i>	3 dokumen	30.000.000	<i>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan</i>	3 dokumen	30.020.000	
2 20 02 2.01 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Padang Panjang	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan , pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	3 Dokumen	30.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Padang Panjang	Jumlah dokumen koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral	3 Dokumen	30.020.000	
2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARA AN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN		indeks keamanan informasi	375	11,950,000	PROGRAM PENYELENGGAR AAN PERSANDIAN UNTUK		indeks keamanan informasi	375	11,960,000	

	INFORMASI					PENGAMANAN INFORMASI					
2 21 02 2.01	<i>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>Jumlah Pelatihan Persandian yang dilaksana n</i>	<i>1 kegiatan</i>	<i>11,950,000</i>	<i>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>		<i>Jumlah Pelatihan Persandian yang dilaksanakan</i>	<i>1 kegiatan</i>	<i>11,960,000</i>	
2 21 02 2.01 03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Padang Panjang	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintah n daerah kabupaten/ko ta berbasis elektronik dan non elektronik Jumlah pelatihan	1 Laporan 1 Kegiatan	11,950,000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Padang Panjang	Jumlah laporan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah kabupaten/kota berbasis elektronik dan non elektronik	1 Laporan	11,960,000	
TOTAL					7.286.233.050	Total				8.947.787.850	

Dalam Rancangan Awal RKPD Tahun 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika mendapat alokasi anggaran sebesar Rp 7.286.233.050 sementara berdasarkan hasil analisis kebutuhan diperlukan anggaran sebesar Rp. 8.947.787.850, sehingga dapat disimpulkan bahwa anggaran yang tersedia dalam rancangan RKPD tersebut belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan Dinas Komunikasi dan Informatika. Adapun rincian masing masing kebutuhan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN.

Masih terdapat kekurangan anggaran untuk memenuhi gaji/tunjangan ASN (25 ASN) yang diperkirakan sebesar Rp. 3.236.670.000 atau kurang sebesar Rp.258.681.000 dari pagu RKPD.

2. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi.

Untuk anggaran yang tersedia baru bisa memenuhi belanja makan minum rapat untuk 1.300 ok dari target renstra sebesar 2.000 ok. Sementara untuk perjalanan dinas baru teranggarkan untuk 144 oh perjalanan dinas dalam daerah dan 30 oh perjalanan dinas luar daerah. Jika dibandingkan dengan kondisi anggaran 2023 masih dibutuhkan anggaran sebesar Rp.135.561.250 untuk sub kegiatan ini

3. Sub Kegiatan Layanan Hubungan Media

Sub kegiatan ini berisikan kebutuhan anggaran untuk belanja untuk kerjasama media dalam rangka penyebaran informasi pembangunan daerah melalui pariwisata/publikasi media. Pada RKPD anggaran untuk sub kegiatan ini baru tersedia Rp.527.976.250 sedangkan berdasarkan analisa kebutuhan dibutuhkan anggaran sebesar Rp.1.527.167.250 atau masih perlu dianggarkan sebesar Rp.997.191.000.

4. Sub kegiatan Pengelolaan e Government Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah.

Pada sub kegiatan ini masih terdapat kekurangan anggaran untuk belanja internet yang baru dianggarkan untuk 10 (sepuluh) bulan sebesar Rp. 200.000.000,-.

Berdasarkan uraian di atas, diperkirakan masih ada kebutuhan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika sebesar Rp. 1.661.551.250 yang belum tersedia dalam Rancangan RKPD 2024.

BAB III

TUJUAN, SASARAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

3.1 Telahaan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam hal perencanaan program dan kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang haruslah merujuk pada telaahan sasaran dan kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, BSSN dan BPS agar memperoleh dukungan terhadap seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan serta terciptanya sinkronisasi program dari pusat sampai ke daerah.

3.1.1 Kementerian Komunikasi dan Informatika

Merujuk pada Renstra Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kementerian Kominfo) Tahun 2019-2024, Visi Kementerian Kominfo untuk Tahun 2019-2024 adalah 'Terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian gotong royong'. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, upaya untuk mewujudkan visi ini ditekankan pada upaya mewujudkan masyarakat yang berpengetahuan, mandiri, dan berdaya saing tinggi melalui pemanfaatan TIK. Visi tersebut diwujudkan untuk mencapai sejumlah tujuan Kementerian Kominfo, antara lain :

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK berkualitas di seluruh wilayah Indonesia
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital
3. Memperkuat transparansi informasi publik dan pengelolaan komunikasi publik.

Adapun sasaran dari tujuan tersebut antara lain adalah :

1. Meningkatnya pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK, serta kontribusi sektor informasi dan komunikasi dalam pertumbuhan ekonomi
2. Meningkatnya cakupan jaringan pita lebar yang cepat dan terjangkau

3. Meningkatnya cakupan wilayah yang terlayani penyiaran digital
4. Meningkatnya konektivitas layanan pos
5. Terwujudnya konektivitas Next Generation Broadband Nasional
6. Meningkatnya pemanfaatan spektrum frekuensi radio dan kualitas pengelolaan layanan publik bidang pos, telekomunikasi dan informatika.
7. Meningkatnya pemanfaatan TIK di sektor ekonomi dan bisnis
8. Terwujudnya masyarakat yang cerdas digital
9. Dukungan implementasi digitalisasi pemerintah
10. Meningkatnya kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi public
11. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik

3.1.2 Badan Sandi dan Siber Negara

Selaras dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Persandian, Seksi Persandian mempunyai tugas menyelenggarakan persandian untuk pengamanan informasi. Untuk menjalankan tugas tersebut, Seksi Persandian dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan keamanan informasi di lingkungan daerah;
2. Penyusunan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi yang meliputi pengelolaan berklasifikasi, pengelolaan sumber daya manusia sandi, perangkat lunak persandian, pengelolaan perangkat keras dan pengelolaan jaring komunikasi sandi;
3. Penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota lingkungan provinsi;
4. Penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan sandi;
5. Penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi operasional pengamanan komunikasi sandi;
6. Pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi;
7. Pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik pemerintah daerah;
8. Pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah;

9. Pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi;
10. Penyusunan rencana kebutuhan sumber daya manusia sandi;
11. Peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
12. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar;
13. Pengadaan, penyimpanan, distribusi dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian;
14. Pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi;
15. Penyusunan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
16. Penyusunan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
17. Penyusunan rencana kebutuhan unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
18. Perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan hubungan komunikasi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
19. Koordinasi pelaksanaan hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi;
20. Pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instalasi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya;
21. Pengamanan informasi elektronik;
22. Pengelolaan Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi;
23. Pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi;

24. Penyusunan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional, pengamanan komunikasi sandi;
25. Pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
26. Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional Sandiman.

3.1.3 Badan Pusat Statistik

Merujuk pada Renstra Badan Pusat Statistik Tahun 2020-2024, adalah “Pelopor Data Statistik Terpercaya untuk Semua”. Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya, sebagai penyedia data dan informasi statistik menjadi semakin penting, karena dapat dipercaya semua pihak. Di samping itu, visi BPS juga memberikan ruang bagi berbagai pihak untuk ikut serta dalam menyediakan, memanfaatkan, dan menggunakan data dan informasi statistik. Visi tersebut diwujudkan untuk mencapai sejumlah Tujuan Badan Pusat Statistik.. Tujuan Badan Pusat Statistik yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat adalah Penguatan Sistem Statistik Nasional melalui koordinasi dan pembinaan yang efektif di bidang statistik.

Di dalam tujuan tersebut memuat misi Badan Pusat Statistik sebagai koordinator penyelenggaraan statistik di Indonesia, baik statistik yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah ataupun masyarakat. Dengan demikian, fungsi BPS sebagai Pusat Rujukan Statistik dapat menghasilkan data dan informasi statistik yang diperlukan oleh semua pihak.

3.1.4 Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat

Dalam rangka mewujudkan Sasaran Strategis di atas, Kementerian Kominfo merumuskan sejumlah Arah Kebijakan yang beberapa di antaranya terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat, antara lain:

1. Penerapan e-Government untuk mendukung proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui strategi, antara lain:
 - a. penguatan kebijakan e-Government yang mengatur kelembagaan e-Government, penguatan sistem dan infrastruktur e-Government yang terintegrasi;
 - b. penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik;
 - c. dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK;
2. Mempercepat implementasi e-Government dengan mengutamakan prinsip keamanan, interoperabilitas dan cost-effective melalui:
 - a. Menetapkan Masterplan e-Government Nasional sebagai rujukan bagi pengembangan e-Government di seluruh instansi pemerintah;
 - b. Melakukan moratorium pembangunan fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data oleh instansi pemerintah untuk kemudian bermigrasi ke pusat data bersama dengan memperhatikan solusi sistem yang efisien dan ramah lingkungan, antara lain komputasi awan (cloud computing);
 - c. Membangun infrastruktur bersama yaitu jaringan komunikasi pemerintah yang aman (secured government network) serta fasilitas pusat data dan pusat pemulihan data yang terkonsolidasi;
 - d. Mendorong pengembangan industri TIK dalam negeri melalui harmonisasi kebijakan, regulasi, dan program pemerintah, serta implementasi kebijakan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), insentif bagi peningkatan kualitas SDM TIK nasional, dan insentif bagi manufaktur lokal.

3. Mendorong Keterbukaan Informasi Publik dan Komunikasi Publik, yang akan ditempuh dengan strategi:
 - a. Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;
 - b. Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah, wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU No. 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Negara yang transparan, efektif, efisien, dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;
 - d. Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan;
 - e. Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kerpriadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal, dan rawan konflik;
 - f. Penguatan media center, media komunitas, media publik lainnya, Kelompok Informasi Masyarakat (KIM), dan MPustaka sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif;
 - g. Kampanye publik terkait revolusi mental;
 - h. Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi;
 - i. Penguatan Government Publik Relation (GPR) untuk membangun komunikasi interaktif antara pemerintah dan masyarakat;
 - j. Penguatan Komisi Informasi Pusat (KIP), Dewan Pers, dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).
4. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi:
 - a. Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta, dan media untuk mengedukasi masyarakat

mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;

- b. Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan, dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya; dan
- c. Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.

- 5. Meningkatnya koordinasi dan kerjasama dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional. Indikator Sasaran strategis tersebut adalah jumlah metadata kegiatan statistik sektoral dan khusus yang dihimpun.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Komunikasi dan Informatika

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2024 mengacu RPD Kota Padang Panjang tahun 2024-2026 pada tujuan kedua **“Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih Dan Akuntabel”** dan sasaran kelima **“Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah”**. Selanjutnya berdasarkan tujuan dan sasaran RPD tersebut dirumuskanlah Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 sebagai berikut :

Tujuan : Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Sasaran 1 : Meningkatnya implementasi transformasi digital dan pengembangan ekosistem kota cerdas

Sasaran 2 : Meningkatnya penyelenggaraan satu data dalam penyelenggaraan pemerintahan (kualitas, pengelolaan dan pemanfaatan)

Selanjutnya sebagai ukuran keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran, dirumuskanlah indikator kinerja yang akan digunakan, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun 2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah		Indeks SPBE	nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah yang meliputi tingkat kematangan kapabilitas proses dan kapabilitas layanan (berdasarkan hasil evaluasi Kemenpan RB dengan skala indeks 1-5)	3,00
		Meningkatkan implementasi transformasi digital dan pengembangan ekosistem kota cerdas	Indeks domain layanan SPBE	Nilai SPBE yang didapatkan dari tingkat kematangan pengelolaan layanan publik dan layanan administrasi pemerintah daerah (berdasarkan hasil evaluasi Kemenpan RB dengan skala indeks 1-5)	2,60
		Meningkatnya penyelenggaraan satu data dalam penyelenggaraan pemerintahan(kualitas, pengelolaan dan pemanfaatan)	Indeks Domain Pembangunan Statistik	Nilai capaian Penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dan Data Statistik Sektoral baik di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.(berdasarkan hasil evaluasi BPS dengan skala indeks 1-5)	2,80

Sumber data Dinas Kominfo Kota Padang Panjang Tahun 2023

Selain Indikator Kinerja Utama sebagai dijelaskan di atas, juga terdapat Indikator Kinerja Kunci (IKK) berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diatur dalam UU 23 Tahun 2014 sebagai dasar pelaksanaa Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) sesuai Permendagri 18 Tahun 2020.

Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, bahwa capaian kinerja urusan pemerintahan dalam penyusunan LPPD menggunakan IKK Output (Keluaran) dan IKK Outcome (Hasil) yang merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Indikator Kinerja Kunci yang terdapat pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang meliputi 3 (tiga) urusan wajib pemerintahan yang diselenggarakannya, dengan target capaian sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2

**INDIKATOR KINERJA KUNCI (IKK) PENYELENGGARAAN URUSAN
PEMERINTAHAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024**

(Sesuai dengan urusan pemerintahan yang diatur dalam UU 23 Tahun 2014)

NO	INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	RUMUS	TARGET TAHUN 2024
1	Urusan Komunikasi dan Informatika		
	a. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh dinas kominfo	100%

	yang disediakan dinas kominfo	----- x 100% Jumlah OPD	
	b. Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah layanan public yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi ----- x 100% Jumlah layanan public	100%
	c. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota	Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten / kota ----- x 100% Jumlah penduduk	44%
2	Urusan Statistik		
	a. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam Menyusun perencanaan pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah ----- x 100% Jumlah OPD	100%
	b. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam evaluasi pembangunan daerah ----- x 100%	100%
3	Urusan Persandian		
	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	Jumlah nilai per area keamanan informasi ----- x 100%	71%

		Jumlah area penilaian	
4	Transparansi dan Partisipasi Publik		
	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	Realisasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda ----- x 100% Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda	100%
	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website Pemda ----- x 100% Total dokumen yang telah dirinci	100%

3.3 Program dan Kegiatan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang, sebagai lembaga teknis daerah telah dapat menyusun Rencana Kerja (Renja) yang meliputi program dan kegiatan untuk dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2024, yang merupakan pelaksanaan tahun pertama dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, yang meliputi 5 (lima) program dengan dengan 10 (Sepuluh) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika

Kota Padang Panjang Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Sub Unit Organisasi : 2.16.2.20.2.21.01.0000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kode						Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
(1)						(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
						DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				7,298,236,600					6,983,423,335
2						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR									
2	16					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				7,256,256,600					6,941,473,335
2	16	01				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika		100 Persen	3,682,422,500			Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika	100 Persen	3,572,710,535

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	1	0	2.		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah		100 persen	2,977,989,000			Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100 persen	2,859,323,385
2	1	0	2.	00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350 Orang/bulan	2,977,989,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	350 Orang/bulan	2,859,323,385
2	1	0	2.		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 Persen	12,000,000			persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 Persen	-
2	1	0	2.	00	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Paket	12,000,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket	
2	1	0	2.		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		100 persen	203,146,400			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 Persen	291,298,350
2	1	0	2.	00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	8,141,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	8,141,000

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	1	0	2.	00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Paket	34,999,650	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	21,103,900
2	1	0	2.	00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Paket	10,000,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12,053,450
2	1	0	2.	00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Laporan	150,005,750	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	250,000,000
2	1	0	2.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan		100 persen	50,000,000			Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan	100 Persen	20,000,000
2	1	0	2.	00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	29 Unit	50,000,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	20,000,000
2	1	0	2.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi		100 Persen	295,678,400			Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi	100 Persen	258,480,000

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	1	0	2.	00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36 Laporan	110,000,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	36 Laporan	110,000,000
2	1	0	2.	00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	185,678,400	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	148,480,000
2	1	0	2.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik		100 Persen	143,608,700			Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	100 Persen	143,608,800
2	1	0	2.	00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Unit	87,168,700	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	7 Unit	87,168,800
2	1	0	2.	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54 Unit	26,440,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	54 Unit	26,440,000

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	1	0	2.	00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	30,000,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi	1 Unit	30,000,000
2	1	0			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik		44 Persen	1,321,391,300			Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	44,5 Persen	1,214,166,300
2	1	0	2.		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah follower pada laman resmi kominfo padang panjang (instagram)		27.000followers	1,321,391,300			jumlah follower pada laman resmi kominfo padang panjang (instagram)	28000followers	1,214,166,300
2	1	0	2.	00	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	415,986,650	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Belanja jasa Tenaga Peliput dan Belanja Modal Kamera dan Lensa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	1 Dokumen	451,690,400
						Jumlah rilis berita mengenai informasi aktual di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang melalui media sosial		1000 rilis				Jumlah rilis berita mengenai informasi aktual di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang melalui media sosial	1100 rilis	

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	1 6	0 2	2. 01	00 06	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	269,304,200	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Belanja Modal Peralatan Komputer, Peralatan Studio dan Lisensi Aplikasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	215,580,900
						Jumlah konten informasi publik (pps dan videotron)		850 konten				Jumlah konten informasi publik (pps dan videotron)	875 konten	
						Jumlah PPID pembantu yang sudah dilakukan monev keterbukaan informasi publik		5 OPD				Jumlah PPID pembantu yang sudah dilakukan monev keterbukaan informasi publik	10 OPD	
2	1 6	0 2	2. 01	00 07	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Layanan	610,829,200	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Media Cetak, Media Online, Radio dan TV	Jumlah Layanan Hubungan Media	5 Layanan	513,200,000
						Jumlah pertemuan jumpa pers		8 kali				Jumlah pertemuan jumpa pers	8 kali	
						Jumlah penerbitan majalah serambi mekkah		2 edisi				Jumlah penerbitan majalah serambi mekkah	2 edisi	

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	1	0	2.	00	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasi Informasi Program atau Kebijakan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	25,271,250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasi Informasi Program atau Kebijakan	1 Dokumen	33,695,000
	6	2	01	12		Jumlah web KIM		2 website				Jumlah web KIM	2 website	
						Jumlah pelatihan bakohumas yang diadakan		1 pelatihan				Jumlah pelatihan bakohumas yang diadakan	1 pelatihan	
2	1	0			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks domain tata kelola SPBE		3,60 Indeks	2,252,442,800			Indeks domain tata kelola SPBE	3,70 Indeks	2,154,596,500
2	1	0	2.		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan		4 aplikasi	2,252,442,800			Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	4 aplikasi	2,154,596,500
	6	3	02			Tingkat Kematangan Layanan SPBE		4 level				Tingkat Kematangan Layanan SPBE	4 level	
						Tingkat Kematangan Manajemen SPBE		3 level				Tingkat Kematangan Manajemen SPBE	3 level	

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	1 6	0 3	2. 02	00 01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	343,623,600	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	1. Masterplan Smart City 2. Pengembangan Aplikasi e-TPP, e-Office, Info Pangan dan Satu Data	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen	277,953,600
						Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan		4 aplikasi				Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	4 aplikasi	
2	1 6	0 3	2. 02	00 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1,908,819,200	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Pembayaran Internet Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	1 Dokumen	1,876,642,900
						Jumlah jenis infrastruktur teknologi informasi yang dikelola		7 jenis				Jumlah jenis infrastruktur teknologi informasi yang dikelola	7 jenis	

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	2	0			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				30,020,000					30,000,000
2	2	0	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Statistik Sektoral yang berkualitas		35 Persen	30,020,000			Persentase Data Statistik Sektoral yang berkualitas	70 Persen	30,000,000
2	2	0	2	2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan		3 dokumen	30,020,000			Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan	3 dokumen	30,000,000
						Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral		80 Persen				Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral	90 Persen	
2	2	0	2	2.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	30,020,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	1 Dokumen	30,000,000
						Jumlah jenis dokumentasi statistik sektoral yang diadakan		3 dokumen				Jumlah jenis dokumentasi statistik sektoral yang diadakan	3 dokumen	

(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
2	2				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				11,960,000					11,950,000
2	2	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	indeks KAMI		456 indeks	11,960,000			indeks KAMI	500 indeks	11,950,000
2	2	0	2.		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pelatihan persandian yang dilaksanakan		1 pelatihan	11,960,000			jumlah pelatihan persandian yang dilaksanakan	1 pelatihan	11,950,000
	1	2	01			Tingkat Kesiapan Keamanan Informasi		II level				Tingkat Kesiapan Keamanan Informasi	III level	
2	2	0	2.	00	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	11,960,000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)		Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	1 Laporan	11,950,000
	1	2	01	03		Jumlah pelatihan persandian yang dilaksanakan		1 pelatihan				Jumlah pelatihan persandian yang dilaksanakan	1 pelatihan	

Berdasarkan tabel di atas, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 dan perkiraan maju tahun 2025 dapat dirinci sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika,

- a. **Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**, dengan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
 - i. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- b. **Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**, dengan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu:
 - i. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapannya.
- c. **Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah**, dengan 4 (empat) sub kegiatan, yaitu:
 - i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor.
 - ii. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - iii. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - iv. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
- d. **Kegiatan Pengadaan Barang Milik Pemerintah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** dengan 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :
 - i. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.
- e. **Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu:**
 - i. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
 - ii. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- f. **Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan 3 (tiga) sub kegiatan antara lain :
 - i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
 - ii. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
 - iii. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan 1 (satu) kegiatan yaitu :

a. **Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** dengan 4 sub kegiatan, antara lain :

- i. Pengelolaan Media Komunikasi.
- ii. Pelayanan Informasi Publik.
- iii. Layanan Hubungan Media.
- iv. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas.

3. Program Aplikasi Informatika dengan 1 (satu) kegiatan yaitu :

a. **Kegiatan Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** dengan 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- i. Penatalaksanaan dan pengawasan e government dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota.
- ii. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah.

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektor dengan 1 (satu) kegiatan yaitu :

a. **Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** dengan 1 (satu) sub kegiatan yaitu :

- i. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektor.

5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan 1 (satu) kegiatan yaitu

a. **Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** yang terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu:

- i. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Dalam rangka melaksanakan urusan wajib pemerintahan dibidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang menyusun Rencana Kerja (Renja) yang meliputi program, kegiatan dan sub kegiatan untuk dapat dilaksanakan pada tahun anggaran 2024 yang meliputi 5 (lima) program dengan dengan 10 (Sepuluh) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan, sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2024

Kode					Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Renstra OPD	Rencana Tahun 2024				Prioritas Nasional	Prioritas Daerah	Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
								Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana				Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
					DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					7.298.236.600						-	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
2	16				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					7.256.256.600						6.941.473.335	
2	16	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Komunikasi Dan Informatika			100 Persen	3.682.422.500					100 Persen	3.572.710.535	
2	16	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah			100 persen	2.977.989.000					100 persen	2.859.323.385	

2	16	01	2.02	00 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	350 Orang/bulan	2.977.989.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	OPD	350 Orang/bulan	2.859.323.385	
2	16	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	persentase pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100 Persen	12.000.000					100 Persen	-	
2	16	01	2.05	00 02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	25 Paket	12.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang	OPD	0 Paket		

													BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif				
2	16	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			100 persen	203.146.400					100 Persen	291.298.350	
2	16	01	2.06	00 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	4 Paket	8.141.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	OPD	4 Paket	8.141.000	
2	16	01	2.06	00 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	4 Paket	34.999.650					4 Paket	21.103.900	
2	16	01	2.06	00 05	Penyediaan Barang dan Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	12 Paket	10.000.000					12 Paket	12.053.450	
2	16	01	2.06	00 09	Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi SKPD		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan , Semua	24 Laporan	150.005.750					24 Laporan	250.000.000	

								Kel/Desa										
2	16	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah Sesuai Dengan Perencanaan			100 persen	50.000.000						100 Persen	20.000.000	
2	16	01	2.07	00 11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa	29 Unit	50.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	OPD	1 Unit	20.000.000		
2	16	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang terpenuhi			100 Persen	295.678.400						100 Persen	258.480.000	

2	16	01	2.08	00 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36 Laporan	110.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	OPD	36 Laporan	110.000.000	
2	16	01	2.08	00 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Laporan	185.678.400					12 Laporan	148.480.000	
2	16	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah ber kondisi baik			100 Persen	143.608.700					100 Persen	143.608.800	
2	16	01	2.09	00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	7 Unit	87.168.700				OPD	7 Unit	87.168.800	

2	16	01	2.09	00 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		- Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	54 Unit	26.440.000		Publik	akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		54 Unit	26.440.000	
2	16	01	2.09	00 11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	30.000.000					1 Unit	30.000.000	
2	16	02			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik			44 Persen	1.321.391.300					44,5 Persen	1.214.166.300	
2	16	02	2.01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah follower pada laman resmi kominfo padang panjang (instagram)			27.000 followers	1.321.391.300					28000 followers	1.214.166.300	
2	16	02	2.01	00 05	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	415.986.650	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif	Masyarakat	1 Dokumen	451.690.400	
						Jumlah rilis berita mengenai informasi aktual di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang melalui media			1000 rilis						1100 rilis		

						sosial							dan Kolaboratif				
2	16	02	2.01	00 06	Pelayanan Publik	Informasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	269.304.200	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Masyarakat	1 Dokumen	215.580.900	
							Jumlah konten informasi publik (pps dan videotron)		850 konten						875 konten		
							Jumlah PPID pembantu yang sudah dilakukan monev keterbukaan informasi publik		5 OPD						10 OPD		
2	16	02	2.01	00 07	Layanan Media	Hubungan	Jumlah Layanan Hubungan Media	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Layanan	610.829.200	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja	Masyarakat	5 Layanan	513.200.000	
							Jumlah pertemuan jumpa pers		8 kali						8 kali		

						Jumlah penerbitan majalah serambi mekkah			2 edisi			penyelenggara pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif		2 edisi		
2	16	02	2.01	0012	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	25.271.250	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhan kam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Masyarakat	1 Dokumen	33.695.000
						Jumlah web KIM			2 website						2 website	
						Jumlah pelatihan bakohumas yang diadakan			1 pelatihan						1 pelatihan	
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Indeks domain tata kelola SPBE			3,60 Indeks	2.252.442.800					3,70 Indeks	2.154.596.500
2	16	03	2.02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan			4 aplikasi	2.252.442.800					4 aplikasi	2.154.596.500
						Tingkat Kematangan Layanan SPBE			4 level						4 level	

						Tingkat Kematangan Manajemen SPBE			3 level						3 level		
2	16	03	2.02	00 01	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	343.623.600	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Masyarakat	1 Dokumen	277.953.600	
						Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan			4 aplikasi						4 aplikasi		
2	16	03	2.02	00 10	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan dan Pengembangan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	1.908.819.200					1 Dokumen	1.876.642.900	
						Jumlah jenis infrastruktur teknologi informasi yang terkelola			7 jenis						7 jenis		
2	20				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					30.020.000							30.000.000
2	20	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Data Statistik Sektoral yang berkualitas			35 Persen	30.020.000					70 Persen		30.000.000
2	20	02	2.01		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan			3 dokumen	30.020.000					3 dokumen		30.000.000
						Persentase Ketersediaan Data			80						90		

						Statistik Sektoral			Persen					Persen		
2	20	02	2.01	00 01	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral		- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	30.020.000			Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	1 Dokumen	30.000.000	
						Jumlah jenis dokumentasi statistik sektoral yang diadakan			3 dokumen		PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	Masyarakat			
2	21				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					11.960.000					11.950.000	
2	21	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	indeks KAMI			456 indeks	11.960.000				500 indeks	11.950.000	
2	21	02	2.01		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah pelatihan persandian yang dilaksanakan			1 pelatihan	11.960.000				1 pelatihan	11.950.000	
						Tingkat Kesiapan			II level					III level		

						Keamanan Informasi											
2	21	02	2.01	00 03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik		Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	11.960.000			Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersih, akuntabel dan berkualitas		1 Laporan	11.950.000	
						Jumlah pelatihan persandian yang dilaksanakan			1 pelatihan		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukham Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif	Masyarakat	1 pelatihan		

Selanjutnya rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2024 sebagaimana tabel di atas dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Indikator kinerja untuk program ini adalah persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi sebesar 100%. Program ini dirinci dalam 5 (lima) bentuk kegiatan, antara lain sebagai berikut.

- a. **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** dengan indikator kinerja persentase layanan keuangan perangkat daerah sebanyak 100%. Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :
 - i. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN, indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN sebanyak 350 orang/bulan.
- b. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**, dengan indikator kinerja Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah sebesar 100%. Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :
 - i. Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut dan kelengkapannya, indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan sebanyak 25 paket.
- c. **Administrasi Umum Perangkat Daerah**, dengan indikator kinerja Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah sebesar 100%. Kegiatan ini terdiri dari 4 (empat) sub kegiatan, yaitu :
 - i. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah paket komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sebanyak 4 paket.
 - ii. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah paket Barang Cetak dan Penggandaan sebanyak 6 paket.
 - iii. Penyediaan Bahan Logistik Kantor indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan sebanyak 4 paket

- iv. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi OPD sebanyak 24 laporan.
- d. **Pengadaan Barang Milik Pemerintah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan indikator kinerja persentase pemenuhan barang milik daerah sesuai dengan perencanaan sebanyak 100%. Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan, yaitu :
 - i. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya, indikator kinerja sub kegiatan ini adalah jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lain yang disediakan sebanyak 29 unit.
- e. **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan indikator kinerja persentase capaian penyediaan jasa penunjang pemerintah daerah sebesar 100%, yang terdiri dari 2 sub kegiatan antara lain:
 - i. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator kinerja jumlah laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebanyak 36 laporan.
 - ii. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator kinerja Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor sebanyak 12 laporan.
- f. **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** dengan indikator kinerja persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik sebesar 100%. Kegiatan ini terdiri dari 3 sub kegiatan antara lain :
 - i. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan indikator kinerja jumlah kendaraan dinas yang di pelihara sebanyak 7 unit (3 unit roda 4 dan 4 unit roda 2).

- ii. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan indikator kinerja jumlah gedung kantor yang dipelihara sebanyak 1 (satu) unit.
- iii. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan indikator kinerja jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi sebanyak 54 (lima puluh empat) unit.

2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik dengan indikator kinerja Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik dengan target sebesar 44%. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :

- a. **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja jumlah follower pada laman resmi Kominfo Padang Panjang (instagram) sebanyak 27.000 follower. Kegiatan ini terdiri dari 4 sub kegiatan, antara lain :
 - i. Pengelolaan Media Komunikasi Publik dengan indikator kinerja jumlah release berita mengenai informasi aktual di lingkungan pemerintah Kota Padang Panjang melalui media sosial sebanyak 1000 (seribu) rilis dan jumlah dokumen hasil pengelolaan media komunikasi publik sebanyak 1 dokumen.
 - ii. Pelayanan Informasi Publik dengan indikator kinerja jumlah konten informasi publik (pps dan videotron) sebanyak 850 (delapan ratus lima puluh) konten, Jumlah PPID pelaksana yang sudah dilakukan monev keterbukaan informasi publik sebanyak 5 (lima) OPD dan jumlah dokumen hasil pelayanan informasi publik sebanyak 1 dokumen.
 - iii. Layanan Hubungan Media dengan indikator kinerja jumlah layanan hubungan media sebanyak 5 (lima) layanan, Jumlah pertemuan jumpa pers sebanyak 8 (delapan) kali , dan Jumlah penerbitan majalah serambi mekkah sebanyak 2 (dua) edisi dan jumlah dokumen hasil pelaksanaan layanan hubungan media sebanyak 1 dokumen.

- iv. Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas dengan indikator kinerja Jumlah web KIM sebanyak 2 (dua) KIM, Jumlah pelatihan bakohumas yang diadakan sebanyak 1 (satu) kegiatan dan jumlah dokumen kemitraan dengan masyarakat, media dan komunitas dalam mendiseminasikan program/kebijakan.

3. Program Aplikasi Informatika dengan indikator kinerja berupa indeks domain tata kelola SPBE sebesar 3,60. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :

- a. **Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan sebanyak 4 (empat) aplikasi. Tingkat kematangan layanan SPBE level 4, dan tingkat kematangan manajemen SPBE level 3. Kegiatan ini terdiri dari 2 (dua) sub kegiatan yaitu :

- i. Penatalaksanaan dan pengawasan e government dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan indikator kinerja jumlah aplikasi dan proses bisnis pemerintahan berbasis elektronik yang dikembangkan sebanyak 4 (empat) aplikasi, jumlah dokumen hasil Penatalaksanaan dan pengawasan e government dalam penyelenggaraan pemerintah daerah kabupaten/kota sebanyak 1 (satu) dokumen.
- ii. Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja jumlah jenis infrastruktur teknologi informasi yang terkelola sebanyak 7 (tujuh) jenis dan jumlah dokumen hasil Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah sebanyak 1 dokumen.

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan indikator persentase data statistik sektoral yang berkualitas sebanyak 35 %. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu :

- a. **Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan sebanyak 3 (tiga) dokumen, persentase ketersediaan data statistik sektoral sebanyak 80%. Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu :
 - i. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral dengan indikator kinerja Jumlah dokumentasi statistik sektoral yang diadakan sebanyak 3 (tiga) dokumen dan jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral sebanyak 1 dokumen.

5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan indikator indeks keamanan informasi (keamanan informasi) sebesar 456 indeks. Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan yaitu

- a. **Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** dengan indikator kinerja jumlah pelatihan yang diadakan yaitu sebanyak 1 (satu) kegiatan. Kegiatan ini terdiri dari 1 (satu) sub kegiatan yaitu:
 - i. Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik dengan indikator kinerja jumlah pelatihan yang diadakan yaitu sebanyak 1 (satu) kegiatan dan jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik sebanyak 1 dokumen.

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika dimaksudkan untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya alam dalam rangka pembangunan daerah. Disamping itu Renja juga digunakan sebagai tolak ukur kinerja aparat Dinas Komunikasi dan Informatika dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam kurun waktu tahun Anggaran 2024.

Pada Tahun Anggaran tahun 2024, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Padang Panjang akan melaksanakan 5 (lima) program dengan 10 (Sepuluh) kegiatan dan 20 (dua puluh) sub kegiatan melalui kebijakan yang dipilih untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Demikian Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 ini dibuat, untuk dapat jadi pedoman dalam melaksanakan tugas, menjadi acuan serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang Panjang, Agustus 2023

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PADANG PANJANG**

Drs. AMPERA, SH,M.Si

NIP.19680101 199803 1 010